

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini sangat menarik untuk diikuti, bukan dalam rangka merayakan krisis yang berlangsung, tetapi lebih karena banyaknya aspek baru yang sebelumnya tidak pernah dijumpai. Misalnya, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini melibatkan unsur politik yang sangat pekat sehingga penyelesaiannya tidak hanya dengan instrumen ekonomi semata, krisis multi dimensi di Indonesia membawa dampak yang cukup besar bagi iklim perpolitik sampai dengan iklim perekonomian yang membawa Indonesia pada titik terendah. Hal tersebut menyebabkan Indonesia harus bertindak aktif dalam menemukan solusi yang tepat dalam pemecahannya.

Hal lainnya, peristiwa krisis ekonomi di Indonesia telah menyeret beberapa lembaga multilateral, seperti World Bank dan IMF, untuk turut menangani pemulihan ekonomi nasional. Bahkan dalam keterlibatannya, lembaga multilateral tersebut, seakan-akan terpampang bahwa konsep pemulihan ekonomi datang dari lembaga Internasional.

Proses pembangunan di Indonesia sejak awal telah difokuskan pada pergeseran aktivitas ekonomi dari semula dari semula terkonsentrasi pada sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, yang kemudian lebih dikenal dengan strategi Industrialisasi. Dalam waktu yang relatif cepat, proses industrialisasi segera menampilkan hasil yang cukup mengembirakan, seperti ekspansi investasi,

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan perkapita, dan kesempatan kerja yang bervariasi.

Meskipun begitu, kondisi tersebut bukan berarti meniadakan peranan sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia, karena dalam beberapa hal terlihat kontribusi yang diberikan masih cukup besar. Dengan gambaran tersebut bisa dilihat bahwa seiring dengan semakin majunya proses industrialisasi, di Indonesia ternyata sektor pertanian masih ditempatkan dalam posisi cukup penting. Menjadi lebih penting lagi karena pertumbuhan sektor industri yang pesat ternyata tidak secara langsung diikuti oleh penyerapan tenaga kerja dengan porsi yang seimbang. Akhirnya, disatu sisi pertumbuhan dinikmati oleh sektor industri.¹

Pengembangan sektor pertanian di beberapa daerah, menempatkan sektor tersebut menjadi primadona daerah dalam artian bahwa kontribusi di sektor ini sangat mempengaruhi perkembangan daerah dalam pembangunan daerah. Lampung Tengah merupakan wilayah yang pada saat ini masih dalam tahap pengembangan dengan Pertanian sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Kesempatan tersebut mendapat perhatian yang cukup serius oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terutama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang Notabene pusat Pemerintahan Kabupaten ini sekarang berada di Kota Gunung Sugih.

Dapat dilihat bahwa sumbangan yang diberikan oleh Sektor Pertanian dan tentunya didukung oleh sektor lainnya yang berdasarkan tabel berikut menunjukkan bahwa rasio peningkatan yang terjadi cukup besar hasil yang

¹ Erani Yustika Ahmad, *Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonesia dan Globalisasi)*. Jakarta : PT Grasindo, Jakarta 2002, hal 149

didapat dari perkembangan sektor Pertanian dan beberapa sektor lainnya di Lampung Tengah dalam kurun waktu beberapa tahun lalu sampai sekarang. Tabel berikut adalah data perkembangan realisasi PADS periode 1995 – 2000.

Tabel 1.1

Perkembangan Realisasi PADS, Belanja Rutin dan APBD
TA 1995/1999 – 1999/2000 (dalam Ribuan Rupiah)²

No	T. A.	PADS	Rutin	APBD
1	1995/1996	4.330.444,86	77. 896. 787, 87	112. 415. 035, 43
2	1996/1997	5.883.132,71	92. 121. 921, 33	138. 037. 121, 87
3	1997/1998	6.444.933,53	109. 850. 754, 74	161. 462. 114, 06
4	1998/1999	6.537.034,69	131. 037. 093, 70	164. 111. 603, 21
5	1999/2000	6.154.066,43	181. 358. 977, 11	270. 399. 553, 56

Bila dilihat, hal tersebut diatas dapat lebih maksimal apabila optimalisasi di sektor ini ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang nantinya arahan kedepan dapat menjadi modal dalam pengembangan wilayah.

Proses perencanaan yang telah dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan RENSTRA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah periode 2001 - 2005 diantaranya peningkatan produksi, Pengembangan agribisnis dan penanganan pasca panen, koordinasi antar lembaga terkait bidang pertanian serta program yang lainnya. Pelaksanaan program-program tersebut telah sebagian dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa tahun ini.

² Rencana Strategis Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 - 2005, *Gambaran umum dan potensi Kabupaten Lampung Tengah*. RENSTRA 2001-2005 hal 10

Untuk mendukung hal tersebut diatas maka sesuai dengan kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sektor pertanian memasuki babak baru yaitu dengan diterapkannya pendekatan agribisnis dan ketahanan pangan pendekatan ini pada hakekatnya bermaksud meletakkan pertanian secara utuh dengan memperhatikan berbagai faktor penunjang. Melalui pendekatan ini diharapkan sektor pertanian dapat lebih meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama petani dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam proses implementasinya hal tersebut diatas, tidaklah selancar apa yang sudah direncanakan sebelumnya seperti yang tertera dalam RENSTRA Dinas Periode 2001 - 2005 tersebut. Beberapa permasalahan yang timbul adalah seperti pada saat peningkatan produksi, terbentur pada masalah modal yang dimiliki petani dan dibenturkan lagi dengan permasalahan tidak adanya jaminan terhadap harga serta kurangnya atau minimnya kelompok-kelompok tani dalam hal ini informasi dan teknologi bagi para petani dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian diluar arahan Dinas Pertanian sebagai sarana pendukung dan bergaining bagi petani dalam proses peningkatan kualitas pertanian.

Dan hal yang paling penting adalah permasalahan yang timbul terasal dari tahapan peningkatan produksi pertanian dan pemasaran hasil dalam hal koordinasi antar lembaga yang terkait dengan dinas ini. Semula dalam perencanaan seperti yang tertera dalam RENSTRA Kabupaten dan RENSTRA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtukultura dimaksudkan apabila telah sampai pada tahap meningkatkan produksi dan pemasaran hasil maka koordinasi tersebut dapat

diandalkan bagi terbukanya jalan demi pengembangan sektor ini namun realita yang terjadi permasalahan koordinasi dan kerjasama ini tidak seperti yang diharapkan sehingga pada saat terjadinya tahapan diatas Dinas beserta masyarakat harus mengupayakan sendiri dari peningkatan produksi pertanian sampai dengan pemasaran hasil meskipun hal tersebut tidak seluruhnya dan ada proses kerjasama yang jelas dari pihak Stakeholder namun dalam konteks ini mayoritas hanya sebatas formalitas.

Setelah melihat beberapa permasalahan selain hal yang disebutkan diatas maka permasalahan lain yang timbul adalah yakni belum terakomodir potensi-potensi yang ada secara maksimal seperti berkembangnya Agribisnis dikawasan Lampung Tengah.

Pada saat ini tindakan yang diambil oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura mulai dilakukan perbaikan dengan dilakukanya pembacaan yang lebih baik dan pemfokusan pada pengoptimalan potensi tersebut dengan segala sumber daya yang ada serta kontrak kerjasama yang jelas, namun dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan timbulnya berbagai permasalahan yang baru seperti halnya kurangnya sarana dan prasarana yang ada serta dukungan sumberdaya yang memadai dalam pelaksanaan program ini.³

Dalam penelitian ini penulis tertarik akan kondisi yang terjadi di Lampung Tengah yang menuju atau sedang pada tahap pengembangan dengan melihat bagaimanakah perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten tersebut. Dalam hal ini Peneliti membatasi jangkauan penelitian pada Dinas Pertanian Tanaman

³ Ulung Pribadi Drs M.Si, *Diktat Mata kuliah pengembangan organisasi publik*. Universitas muhammadiyah yogyakarta

Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah untuk melihat bagaimanakah formulasi Renstra yang tersebut dan melihat sejauh mana konsistensi dalam pelaksanaanya dan melihat bagaimanakah strategi-strategi yang dipakai dalam meyelasakan permasalahan diatas serta memudahkan penulisan dan menghindari kesulitan dalam memperoleh data.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan tentang penggalian potensi-potensi yang dapat dikembangkan yakni disektor Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul sebagai berikut :

1. Bagaimanakah formulasi Rencana Srategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam Mengembangkan Sektor Pertanian yang diorientasikan pada Ketahanan Pangan dan Agribisnis ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisa Perencanaan Strategis pada tingkatan Formulasi sehingga kedepan dapat memberikan sebuah masukan dalam pengembangan formulasi rencana strategis.
2. Menganalisa pendekatan agribisnis sebagai salah satu pendekatan pada pengembang sektor pertanian yang tertuang pada misi dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam tingkat konsistensi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pemerintahan
 - a. Penelitian ini merupakan penerapan dari pengetahuan yang telah diserap oleh penulis baik dari bangku kuliah maupun dari referensi yang tersedia kedalam lingkungan yang sesungguhnya.
 - b. Mengetahui sejauh mana kontribusi yang dapat diberikan dari Ilmu Pemerintahan dalam aplikasinya di dunia kerja.
 - c. Mengasah pisau analisa penulis dalam mengidentifikasi masalah organisasi sampai pada tahap solusi, resolusi dan ide pengembangan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan memberikan acuan penentuan keputusan yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan yang akan datang baik dalam tahapan formulasi sampai dengan implementasi.
 - b. Mememukan sebuah Ide, Solusi dan Strategi baru dari hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebuah masukan guna mengembangkan Kabupaten Lampung Tengah terutama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam proses pengembangan sektor Pertanian.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah sebelum

penulis menegemukakan teori apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini ada baiknya penuliss mengemukakan definisi teori terlebih dahulu.

Menurut Masri Singarimbun :

*“ Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep ”.*⁴

Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal yaitu, *Pertama* teori adalah serangkaian proporsi antar konsep yang saling berhubungan. *Kedua* teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep yang mana berhubungan dengan konsep. *Ketiga* teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep yang mana berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Menurut Koentjoroningrat :

*“ Teori merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dalam satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat ”.*⁵

Dengan demikian pada dasarnya teori ini merupakan sarana pokok yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Sedangkan landasan pemikiran yang digunakan sebagai kerangka dasar atau pijakan dalam penelitian ini adalah :

⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3, 1989, Hal 37

⁵ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT Gramedia, 1980, Hal 117

1. FORMULASI KEBIJAKAN

a. Kebijakan atau Policy

Menurut Miftah Thoha, dalam arti luas *Policy* mempunyai 2 (dua) aspek pokok antara lain :

1. *Policy* merupakan *praktikal sosial*, ia bukan even yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
2. *Policy* adalah suatu peristiwa, yang ditimbulkan oleh, baik mendamaikan "claim" dari pihak-pihak konflik, atau untuk menciptakan "intensif" bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Dari 2 (dua) aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa *Policy* pada suatu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dilain pihak *Policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan intensif.⁶

Selain itu Carl J Friendrik mengatakan *Policy* adalah :

"It is essential for the policy concept that there be a goal objective or purpose".

⁶ Miftah Thoha, *Praktik Kebijakan Publik*, Jakarta: Rajawali Press, 1992

Artinya adalah : amat mendasar bagi konsep kebijakan terdapatnya suatu tujuan atau sasaran atau kebijakan.⁷

Adapun *public policy*, menurut David Eston dapat dirumuskan sebagai berikut :

*“ the authoritative allocation of value for the whole society but it turns out the only Government can authoritatively act on the whole society and everything the Government choosed. Tho do or not to do result for in the allocations of value ”.*⁸

Artinya : alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semua yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan adalah hasil-hasil alokasi nilai tersebut.

Dari beberapa pengertian kebijakan diatas dan dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu harus mengabdikan bagi kepentingan rakyat banyak atau masyarakat, maka dengan demikian penulis dapat menyimpulkan :

“ Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat ”.

b. Formulasi Kebijakan Publik

Menurut Irfan Islamy, proses kebijakan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

⁷ C J Friendrik, *Man and His Government*, New York, Mc Graw Hills, 1963, hal 70, dalam Thomas Erdie, *Understanding Public Policy*, 1998, hal 2.

⁸ David Eston, *The Political System*, New York : Knof, 1953, hal 129.

1. Perumusan Masalah Kebijakan

Negara tidak semua dalam masyarakat bisa menjadi *Public Problem*, disebut *Public Problem* bila masalah tersebut tidak dapat diatasi secara privat. Untuk menjadi *Policy Problem* (masalah Kebijakan) suatu *Public Problem* perlu diperjuangkan untuk bisa ditanggapi.

2. Penyusunan Agenda Pemerintahan

Agenda pemerintahan adalah serangkaian hal-hal yang secara tegas membutuhkan pertimbangan aktif dan serius dari pembuatan keputusan yang sah. Agenda pemerintah terdiri dari atas 2 (dua) hal :

- a. *Old item*, yaitu masalah yang sudah lama dan tua.
- b. *New Item*, yaitu masalah yang baru-baru ini timbul.⁹

3. Perumusan Usulan Kebijakan Negara

Merupakan kebijakan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan tersebut meliputi :

- a. Identifikasi alternatif
- b. Merumuskan alternatif
- c. Menilai alternatif
- d. Memilih alternatif

4. Pengesahan Kebijakan Negara

Hakikat pengesahan (legitimasi) adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama atas dasar prinsip dan ukuran umum, pengesahan kebijakan ini ada dua jenis yaitu :

⁹ Dan M. Irfan Jelmy, MPA, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi

- a. Pengesahan individu yaitu pengesahan kebijakan yang dilakukan oleh individu, contoh : pengesahan instruksi presiden.
- b. Pengesahan kolektif yaitu proses pengesahan yang dilakukan secara kolektif, contoh : pada pengesahan peraturan daerah, keputusan desa, dan lain-lainnya.

c. Model Kebijakan

Menurut Miftah Thoha kebijakan empat model yaitu :

1. Model Kelembagaan (Institusional Model)

Kebijaksanaan negara sebagai hasil kerja lembaga Pemerintah (contoh Legislatif Dan Yudikatif) Nasional, Regional, Lokal. Model ini tergolong sederhana atau tradisional. Ciri-ciri model ini adalah :

- a. Lembaga Pemerintahan memberi pengabsahan legitimasi.
- b. *Public Policy* bersifat umum atau *universal* karena menyangkut seluruh warga negara.
- c. Hanya pemerintah yang dapat memonopoli kekuasaan.

2. Model Kelompok (Group Model)

Dalam model ini individu (bergabung) pada kelompok dan lewat kelompok ini maka melaksanakan kepentingan-kepentingan pada equilibrium hasil persaingan kelompok tersebut

3. Model Elite-Massa (Elite Model) asumsinya adalah:

- a. Masyarakat terbagi dua golongan yaitu elite dan non elite.

- c. Mobilitas atau pergerakan dari non elite ke elite sangat sulit, hanya non elite yang telah menerima konsensus dasar saja yang dapat masuk dalam lingkungan penguasa.
- d. Golongan elite menggunakan konsensus tadi untuk mendukung nilai-nilai dasar sistem sosial.
- e. Kebijakan tidak mencerminkan keinginan massa namun merupakan preferensi elite.
- f. Elite aktif, massa pasif atau apatis.

4. Model Rasional (Rational Komprehensive Model)

Model ini didasarkan pada konsep “ *Economic man* “ (manusia ekonomi) yang berkaitan dengan *cost benefit*. Kebijakan model ini pealing efisien (perbandingan antara output dan input di perhatikan) dan efektif tanpa memperhitungkan inputnya yang penting outputnya tercapai.¹⁰

5. Model Inkremental (Incremental Model)

Asumsi daari model ini adalah pengambilan kebijakan dengan model “ *disjointed Incrementalism* “ yang berarti bahwa keputusan-keputusan hasil analisa dan evaluasi terhadap kondisi dan masalah-masalah dalam masyarakat diadakan terpisah-pisah, sehingga merupakan penambahan, pengurangan atau perbaikan terhadap kebijaksanaan yang telah ada.

¹⁰ *Model Rational (Rational Komprehensive Model)* ...

6. Model Gabungan (Mixed - Scanning Model)

Model kebijakan ini merupakan model gabungan antara model Inkremental dengan model Rasional Ciri dari model ini adalah mengambil langkah-langkah yang dianggapnya sesuai dengan dengan keadaan dan dalam situasi yang berbeda dan disesuaikan dengan model yang paling baik dari identifikasi kondisi tersebut.

7. Model Spekulasi (Game Model)

dalam model kebijakan ini memiliki ciri memiliki perhitungan dan pertimbangan yang matang, naamun hasil pengambilan keputusannya tidaklah dapat dipastikan, Karen dalam hubungannya dengan perbuatan orang lain. Make akan saaling ketergantungan pengambilan keputusan (Interdependency) dalam memutuskan serta dalam menghadapi suatu peristiwa atau suatu masalah.

8. Model Proses (Process Model)

Asumsi model ini adalah bahwa daalam pengabilan kebijaksanaan melalui suatu proses yang terdiri dar suatu rangkaian kegiatan politik (Political activities). Rangkaian tersebut adalah :

- a. Identifikasi masalah.
- b. Perumusan usulan kebijakan.
- c. Penetapan kebijaksanaan.
- d. Pelaksanaan kebijaksanaan.
- e. Penilaian kebijaksanaan.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa model ini menekan kebijaksanaan dilihat sebagai hasil dari proses kebijaksanaan atau suatu rangkaian-rangkaian dari kegiatan-kegiatan politik seperti diatas.

9. Model Sistem (System Model)

Asumsi model ini adalah system politik merupakan keseluruhan bangunan dari fungsi dan proses yang dalam hubungannya satu dengan yang lain menetapkan nilai-nilai yang sah untuk masyarakat. Proses itu menghasilkan apa yang disebut dengan kebijakan.

Dengan demikian, model-sistem ini didasarkan pada konsep teori informasi, yaitu adanya masukan (inputs), Umpan-balik (Feedback) dan Keluaran atau hasil (Outputs). Oleh karena itu adalah penting dalam penilaian terhadap "inputs" dan "Outputs" serta "Feedback" tersebut.

Disamping hal tersebut diatas perlu diperhatikan masalah atau peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan prosedur pembentukan, susunan dan "interrelations" dari pelaku - pelaku pengambil kebijaksanaan yang merupakan "Political System".¹¹

F. DIFINISI KONSEPSIONAL

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman. Definisi Konsepsional

¹¹ Atik Septi W, Dra M.Si, *Hand Out Mata kuliah Studi implementasi kebijakan : Model-model*

juga merupakan suatu pengertian dari kelompok dan gejala yang menjadi pokok perhatian maka, berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa definisi konseptual yang dapat penulis berikan didalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Formulasi Kebijakan

Suatu tahapan dimana proses pembuatan kebijakan dilakukan. Formulasi kebijakan yang berupa pembangunan dan sintesis alternatif-alternatif pemecahan masalah, pada dasarnya merupakan aktivitas konseptual dan teoritis.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah yang dikepalai oleh Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi, selanjutnya pemerintahan tersebut merupakan aparatur atau organ yang berwenang, berhak atau berkewajiban mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangga sendiri.

3. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dari memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.

G. DIFINISI OPERASIONAL

Merupakan unsur penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur untuk mempermudah dalam penelitian. Menurut Saifudin Anwar definisi operasional adalah bahasa atau definisi suatu variabel agar tidak terjadi ambiguitas yakni memiliki makna ganda atau tidak menunjukkan indikatornya yang jelas.¹² Sehingga penelitian ini akan benar-benar terarah dengan baik dan jelas.

Dalam hal perencanaan strategis pelaksanaan harus ditunjang dengan aspek atau dasar hukum yang nyata dan mempunyai kewajiban oleh karena itu dalam rangka penelitian ini definisi operasionalnya ditunjukkan yaitu :

1. Proses formulasi Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah indikatornya :
 - a. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses bersama Stakeholders.
 - b. Mengidentifikasi mandat organisasi bersama Stakeholders.
 - c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi bersama Stakeholders.
 - d. Menilai Lingkungan Eksternal : Peluang dan Ancaman bersama Stakeholders.
 - e. Menilai Lingkungan Internal : Kekuatan dan Kelemahan bersama Stakeholders.
 - f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi bersama Stakeholders.
 - g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu bersama Stakeholders.

¹² Saifudin Anwar, "Metode Penelitian", Pustaka Pelajar, 2001, Hal 59.

- h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan bersama Stakeholders.

H. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu cara untuk mengumpulkan dan memahami informasi serta menemukan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita yang menjadi sebuah ketertarikan untuk dijadikan sebuah penelitian untuk mendapatkan sebuah gambaran atau jawaban. Didalam penelitian kita bekerja dalam sebuah kerangka kerja, menggunakan prosedur, teknik dan metode yang dapat diuji mengenai validitas dan reabilitas dan berusaha untuk tidak menyimpang serta bersifat objektif. Dalam penelitian sosial terdapat berbagai cara untuk membedakan jenis metode penelitiannya, tetapi secara umum metode penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode Kuantitatif (melalui pendekatan statistik) dan metode Kualitatif (melalui pendekatan analisis deskriptif).

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau ada di lapangan.¹³ Tujuan dari penelitian Deskriptif Kualitatif ini adalah untuk

¹³ Hadiri Nawawi, Prof., Dr., *Metode Penelitian Dibiidang Sosial*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1995, Hal 64

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

2. Jenis Data

Data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan jalan penulis mengadakan wawancara langsung atau kunjungan ke instansi terkait dengan penelitian mengenai Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dengan mencatat dari buku-buku, artikel peraturan-peraturan, serta mencatat dari instansi langsung yang berkaitan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen laporan tahunan tentang perkembangan sektor Pertanian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

3. Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini, unit analisis data dapat diartikan sebagai objek nyata yang akan diteliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana menganalisis perencanaan strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah maka penelitian ini perlu disusun tentukan sebagai unit analisisnya meliputi :

- a. Kepala dan Staff Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kepala dan Staff Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan dari dokumen-dokumen, data catatan yang ada berupa arsip-arsip, grafik, tabel, monografi, dan lain-lain.

- b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mencari sumber data secara langsung kepada responden yang dikehendaki dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dan hasil dari wawancara tersebut menjadi data yang diteliti dalam sebuah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisa kualitatif data, dalam hal ini penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupaya untuk memahami situasi. Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya (Kirk & Muller 1998:9)

Menurut Bogdan dan Taylor :¹⁴

“ metodologi Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif berkenaan dengan data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk simbolik seperti pernyataan-pernyataan tafsiran, tanggapan –tanggapan lisan harafiah, tanggapan-tanggapan verbal, tidak berupa ucapan-ucapan lisan dan grafik-grafik.¹⁵

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dengan cara membaca catatan laporan, dokumentasi resmi dan sebagainya, untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini dengan memperhatikan validitas, reabilitas dan objektivitas.

¹⁴ Bogdan dan Taylor, seperti dikutip lexi J Moelong, dalam *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1993, hal 3

¹⁵ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta PT Raja Grafindo , 1983, hal 119